

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

**2
0
2
6**



KECAMATAN MUARA BADAK

Jl. Gas Alam No. 06 Muara Badak

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan pertolonganNya semata Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA-PD)) Kecamatan Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat tersusun pada waktunya, dimana Usulan Rencana Kerja (Renja) Kinerja yang tertuang dalam Renstra yang meliputi tujuan dan Sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan pada SKPD Kantor Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun anggaran 2026.

Daftar Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA-PD)) tahun anggaran 2026 ini tersusun atas pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta beberapa lampiran Tabel Data Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 yang diperlukan guna penetapan capaian nilai indikator kinerja.

Disadari sepenuhnya bahwasannya penyajian Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA-PD)) tahun Anggaran 2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan/saran-saran dari semua pihak agar dapat segera dilakukan penyempurnaan pada Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

Besar harapan, semoga Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA-PD)) ini dapat mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Usulan Rencana Kerja ini.

Muara Badak, Maret 2025
Camat Muara Badak,



ARPAN.S.Sos
Pembina Tk. I/IV/b
Nip. 196806121988031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra –PD....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
3.1 Program dan Kegiatan	32
BAB IV : PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah).

Tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak sehingga kondisi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD 2024 yang berpedoman RPJPD 2021-2026 dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun Rancangan Rencana Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut :

1. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026.
2. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
3. Pedoman Penyusunan Rancangan Renja-PD Tahun 2026

Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026, Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain :

1. Memastikan sinkronisasi substansi dan proses dengan penyusunan RKPD 2026;
2. Memperhatikan kategori penyusunan RKPD Tahun 2026, menyesuaikan proses dan substansinya, serta mengaplikasikannya pada sipd.kemendagri.go.id.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi RENJA-PD tahun 2021-2026 dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Sektoral;
4. Memastikan data yang digunakan memenuhi kriteria standar data yang baik;

5. Penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil (outcome) berdasarkan hasil pemutahiran cascading.
6. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru antara lain : PP 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM); PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan .

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ke lima RPJMD 2021 – 2026. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak Tahun 2021– 2026 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA “**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berisikan penjabaran Renstra merupakan salah satu bahan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Selain dari itu,penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi di tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2026;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Muara Badak tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah

sebagaimana terumus dalam dokumen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara Badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :

Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dari 5 (Lima) Program / kegiatan yang keluarannya mencapai rata-rata 96.%.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran sebesar Rp.57.896.066.526,- (sesuai DPPA Tahun 2025) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 51.266.140.037- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.359.245.000,- dengan tersusun dalam 6 program , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Muara Badak sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;

3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kecamatan Muara Badak menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

- d) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e) Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :
 - Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
 - Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga

alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini :

TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PD : KECAMATAN MUARA BADAK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2026		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2025			
											Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	38,324,916,589		4,599,041,122		6,466,282,159		1,119,967,578	17.32		6,674,403,148	16,574,340,500	43.25	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	1,071,735,005	18	199,346,000	6	224,790,000	6	211,489,000	94	7	185,000,000	595,835,000	55.60	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	6	239,280,000	3	25,125,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00	2	40,000,000	90,125,000	37.67	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	5	55,000,000	3	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	100.00	1	15,000,000	45,000,000	81.82	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	5	55,000,000	3	39,888,000	1	40,000,000	1	39,888,000	99.72	1	20,000,000	99,776,000	181.41	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	47,600,000	3	9,520,000	1	9,520,000	1	9,520,000	100.00	1	10,000,000	29,040,000	61.01	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	51,350,000	3	35,135,000	1	35,270,000	1	35,135,000	99.62	1	20,000,000	90,270,000	175.79	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	623,505,005	3	74,678,000	1	100,000,000	1	86,946,000	86.95	1	80,000,000	241,624,000	38.75	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	23,563,368,277	3	2,231,918,360	3	3,413,693,001	3	2,978,171,975	87.24	1	4,280,442,575	9,490,532,910	40.28	

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	325	22,692,058,877	25	2,143,169,460	25	3,285,188,101	25	2,849,667,075	86.74	26	4,130,217,675	9,123,054,210	40.20
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	171,109,400	1	20,234,900	1	25,184,900	1	25,184,900	100.00	1	25,184,900	70,604,700	41.26
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	700,200,000	1	68,514,000	1	103,320,000	1	103,320,000	100.00	1	125,040,000	296,874,000	42.40
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	11	409,840,000	1	20,400,000	1	65,761,100	2	65,665,000	99.85	2	75,800,000	161,865,000	39.49
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	165,040,000	0	0	1	24961100.00	1	24,865,000	99.62	1	35,000,000	59,865,000	36.27
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	6	244,800,000	1	20,400,000	1	40,800,000	1	40,800,000	100.00	25/org	40,800,000	61,200,000	25.00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	125	245,000,000	25	74,999,209	25	29,092,500	25	23,802,500	81.82	25	89,092,792	187,894,501	76.69
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	25	60,000,000	0	0	0	0	25	0	#DIV/0!	0	0	0	0.00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125	185,000,000	0	0	25	29,092,500	0	23,802,500	81.82	25 Orang	89,092,792	112,895,292	61.02
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan administrasi Kepegawaian	1	56,700,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	0.00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	74,999,209	25	74,999,209	0	0			#DIV/0!	0	0	574,879,209	766.51
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	3,340,819,565.00	100	291,232,510.00	100	479,804,808.00	100	499,880,000.00	104.18		545,579,849.00	1,336,692,359	40.01
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	71,607,300.00	6	2,576,000	6	10,000,000	1	10,000,000	100.00	6	5,000,000	7,576,000	10.58

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150	216,961,000.00	30	31,829,500	30	20,000,000	1	25,000,000	125.00	30	55,000,000	86,829,500	40.02
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	579,959,745.00	2	67,073,000	1	97,289,000	1	120,000,000	123.34	3	99,707,349	166,780,349	28.76
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	143,734,900.00	2	7,316,800	2	30,000,000	1	25,000,000	83.33	4	10,000,000	17,316,800	12.05
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	355,000,000.00	0	-	0	32,469,000	1	25,000,000	77.00	1	50,000,000	50,000,000	14.08
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	1,534,470,000.00	1	173,562,210	1	224,728,000	1	244,880,000	108.97	1	244,880,000	418,442,210	27.27
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	419,086,620.00	200	8,875,000	200	65,318,808	1	50,000,000	76.55	1	50,000,000	58,875,000	14.05
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30,992,500	30,992,500	154.96
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	37	1,931,740,920		691,718,000		1,123,130,970		444,962,000	39.62	-	200,000,000	1,336,680,000	69.20
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	251,740,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	11	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya	2	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	200,000,000	200,000,000	100.00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	621,732,920	1	19,250,000	1	450,662,970	0	444,962,000	98.73	0	0	464,212,000	74.66
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	737,468,000	1	672,468,000	1	672,468,000		0	0.00	0	0	672,468,000	91.19

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4,160,188,731	100	590,229,799	100	621,481,100	100	589,167,427	94.80	100	791,375,672	1,970,772,898	47.37
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	20,700,000	1	5,500,000	1	19,898,000	1	1,989,000	10.00	1	3,300,000	10,789,000	52.12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	2,459,133,401	1	340,597,356	1	318,970,000	1	306,939,557	96.23	1	504,495,959	1,152,032,872	46.85
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	75,410,400	1	5,090,000	1	12,568,400	1	12,474,030	99.25	1	13,724,970	31,289,000	41.49
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1,604,944,930	1	239,042,443	1	270,044,700	1	267,764,840	99.16	1	269,854,743	776,662,026	48.39
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	3,602,224,091	15	499,197,244	15	508,528,680	15	487,758,328	95.92	15	507,112,260	1,494,067,832	41.48
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	2,456,670,500	1	270,260,244	1	336,806,000	1	327,445,328	97.22	4	382,986,900	980,692,472	39.92
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	345,000,791	2	38,837,000	1	49,560,000	2	38,837,000	78.36	20	30,000,000	107,674,000	31.21
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	740,552,800	1	190,100,000	1	122,162,680	1	121,476,000	99.44	1	94,125,360	405,701,360	54.78
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0	-	0	0.00
1	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	9,424,738,605	3	6,313,095,700	3	593,522,000	3	567,784,500	9.26	1	547,600,000	7,428,480,200	78.82

					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	15	9,424,738,605	-	6,313,095,700	-	593,522,000	-	567,784,500	95.66	1	547,600,000	7,428,480,200	78.82
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1500	332,607,900	300	14,146,900	300	75,000,000	26	54,975,000	73.30	300	75,000,000	144,121,900	43.33
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	363,000,000	1	0	1	39,525,000	13	38,627,500	97.73	13	72,600,000	111,227,500	30.64
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	8,729,130,705	1	6,298,948,800	1	478,997,000	13	474,182,000	98.99	6	400,000,000	7,173,130,800	82.17
1	3				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	29,352,666,765		12,585,271,000		12,649,497,046		12,585,271,000	0.00	100	26,224,773,900	51,395,315,900	175.10
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	1	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	65	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	35	208,045,900	208,045,900	160.04
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase efektifitas pelayanan kepada masyarakat	100	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	2	208,045,900	208,045,900	160.04
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	29,192,666,765	100	12,585,271,000	100	12,649,497,046		12,585,271,000	99.49	100	26,016,728,000	51,187,270,000	175.34
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	30,533,353	0	0	0	0	0	0	0.00	2	996,728,000	996,728,000	3,264.39

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	29,162,133,412	1	12,585,271,000	1	12,649,497,046	1	12,585,271,000	99.49	1	25,020,000,000	50,190,542,000	172.11
1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh	100	98,770,000	2	31,200,000	2	32,000,000	2	31,200,000	61.73	2	32,000,000	59,262,000	60.00
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,770,000		19,754,000		19,754,000		19,754,000	100.00		19,754,000	59,262,000	60.00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	98,770,000	1	19,754,000	1	19,754,000	1	19,754,000	100.00	1	19,754,000	59,262,000	60.00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65 Persen	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0.00	65	25,000,000	25,000,000	50.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	25,000,000	25,000,000	50.00
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	25,000,000	25,000,000	50.00
1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	80	173,396,250	100	40,188,400	100	43,803,750	100	40,188,400	52.08	100	101,615,000	181,991,800	104.96

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	80	173,396,250		40,188,400		43,803,750		40,188,400	91.75		101,615,000	181,991,800	104.96
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	-	1	22,810,900	1	22,811,250		22,810,900	100.00	1	22,811,250	68,433,050	#DIV/0!
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	13	41,985,000	6	17,377,500	6	20,992,500		17,377,500	82.78	0	0	34,755,000	82.78
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	43,803,750	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	87,607,500	0	0	0	0	100	0	0.00	1	78803750	78,803,750	89.95

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang Renstra Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Muara Badak telah menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2021-2026 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak yang dapat terealisasi Anggaran dua tahun terakhir 2023 sebesar 96.86% dan tahun 2024 sebesar 94.3 % dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Badak, yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan
- b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- c. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Muara Badak

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 2.1 & tabel 2.2 berikut, dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring & evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran dan Capaian Kinerja Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dan Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari **Tabel T-C.30** pada lampiran.

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	71.00%	72.00%	72.70%	73.00%	74.00%	87.72%	90,42%	93.00%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Persentase Keluhan Masyarakat	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
4	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Presentase Capaian Ketentraman	65.00%	71.00%	74.00%	78.00%	80.00%	100.00%	100%	100.00%	Peningkatan Kinerja dan Jumlah ASN
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Persentase Peertumbuhan PADes	92.00%	28.00%	30.00%	35.00%	40.00%	76.73%	30%	35.00%	Perlu adanya review nilai target kinerja
6	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Nilai Pertumbuhan	68.00%	74.00%	82.00%	89.00%	95.00%	0%	0%	0%	Surat Pernyataan Camat tentang Kewenangan Pungutan PAD tidak ada karena sudah menjadi kewenangan OPD Teknis

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Badak tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh factor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Badak berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut seringkali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

c. Keberadaan sumber daya yang meliputi sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Muara Badak :

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas

masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja. Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.
3. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Langkah-langkah strategis yang baik disetiap program dan kegiatan prioritas di masing-masing perangkat daerah yaitu :

- a) Penguatan kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah baik melalui pemerintah maupun non pemerintah.
- b) Kesetaraan antara para pemangku *kepentingan* dari unsur Pemerintah dan non pemerintah,
- c) Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal,
- d) Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif,
- e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Awal RKPD.

Review rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kuota/hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD.

Dalam Review rancangan awal rencana kerja RKPD terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan antara program dan kegiatan berbeda besaran anggarannya.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel TC.31 berikut :

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : MUARA BADAK

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	6,496,338,265	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	7,266,548,265	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	279,790,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	685,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	140,000,000	
	Penyusunan Dokumen renstra			20,000,000	Penyusunan Dokumen renstra			100,000,000	
	Penyusunan Dokumen RENJA			10,000,000	Penyusunan Dokumen RENJA			30,000,000	
	Penyusunan Dokumen Renja P			10,000,000	Penyusunan Dokumen Renja P			10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,520,000				9,520,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,270,000				10,270,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	100,000,000	

	Penyusunan Laporan e-Pantau, Laporan Manajemen Risiko dan LKJP				Penyusunan Laporan e-Pantau, Laporan Manajemen Risiko dan LKJP				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	
	Evaluasi Renstra dan Renja			100,000,000	Evaluasi Renstra dan Renja				
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	300,000,000	
	Satu Data (Becik)				Satu Data (Becik)			50,000,000	
	Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)				Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)			250,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renja)				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Dokumen	3,980,878,304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Dokumen	4,005,878,304	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,810,653,404	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,810,653,404	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,184,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,184,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	145,040,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	145,040,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Dokumen	65,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Dokumen	265,800,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Dokumen	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Dokumen	150,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	40,800,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	180,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	320,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26 Orang	180,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26 Orang	180,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Orang	140,000,000	
					Biaya Pengadaan Pakaian Adat PDH Miskat		26 Stel	45,000,000	
					Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap Baju, Celana Training, Sepatu, Kaos Kaki dan Topi)		26 Stel	65,000,000	
					Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Pakaian Dinas Lapangan)		26 Stel	30,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	598,261,349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	598,261,349	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,707,349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,707,349	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262,554,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262,554,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 unit	80,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 unit	80,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	80,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	80,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	728,430,352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	728,430,352	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,300,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	395,707,209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	395,707,209	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,568,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12,568,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269,854,743	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269,854,743	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Laporan	583,178,260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Laporan	583,178,260	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	452,986,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	452,986,900	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90,191,360	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90,191,360	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 persen	4,720,533,353	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 persen	5,714,533,353	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 kegiatan	200,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 kegiatan	250,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250,000,000	
	HUT RI DI KECAMATAN			200,000,000	HUT RI DI KECAMATAN			250,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	30,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	100,000,000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100,000,000	
	OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU				OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU			50,000,000	
	PRAMUKA			30,000,000	PRAMUKA			50,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	202 Kegiatan	4,490,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	202 Kegiatan	5,364,533,353	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	50,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	924,000,000	
	PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN				PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN			500,000,000	
	FASILITASI PATEN			50,000,000	FASILITASI PATEN			70,000,000	
	PENANGANAN DARURAT BENCANA				PENANGANAN DARURAT BENCANA			150,000,000	

	PEMELIHARAAN LPJU KECAMATAN				PEMELIHARAAN LPJU KECAMATAN			204,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	198 Laporan	4,440,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	198 Laporan	4,440,533,353	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	78 Persen	955,645,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	78 Persen	1,070,645,900	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	305,645,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	420,645,900	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65 Lembaga Kemasyarakatan	190,000,000	
	Bupati Caup				Bupati Caup			100,000,000	
	Musrenbang			75,000,000	Musrenbang			90,000,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	72,600,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	72,600,000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	158,045,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	158,045,900	
	FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA			108,045,900	FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA			108,045,900	
	BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)			50,000,000	BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)			50,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	650,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	650,000,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000	
	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK			155,000,000	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK			155,000,000	
	Operasional PKK			200,000,000	Operasional PKK			200,000,000	
	FORUM ANAK			50,000,000	FORUM ANAK			50,000,000	

	Honor LINMAS			195,000,000	Honor LINMAS + Operasional			195,000,000	
	Jambore PAUD			50,000,000	Jambore PAUD			50,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81 Persen	50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81 Persen	175,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76 Persen	50,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76 Persen	175,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,000,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	175,000,000	
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			75,000,000	
	SAFARI RAMADHAN				SAFARI RAMADHAN			100,000,000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74 persen	295,650,542	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74 persen	350,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	295,650,542	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	350,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	125 Orang	245,650,542	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	125 orang	300,000,000	
	Fasilitasi Kegiatan MTQ			245,650,542	Fasilitasi Kegiatan MTQ			300,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			150,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			250,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	150,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	250,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			150,000,000	Evaluasi APBDes (13 Desa) dan Aset Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	100,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	100,000,000	Lomba Desa Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
	JUMLAH			12,668,168,060				14,826,727,518	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan serta infrastruktur kecamatan

Dalam Deskripsi yang disajikan tentang bagaimana Usulan program dan kegiatan wilayah usulan pemangku kepentingan dapat di peroleh dan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pendukung lainnya. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagai berikut :

- a. Peningkatan layanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Berdasarkan Standard Kerja.
- c. Peningkatan Disiplin. Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kecamatan.
- d. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Bertanggung Jawab.
- e. Penerapan standard pelayanan PATEN Kecamatan secara menyeluruh.
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah kecamatan.
- g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik dan jalan lingkungan Kecamatan.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana umum bagi kepentingan publik di wilayah Kec.

Program kegiatan yang menjadi prioritas adalah proses pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian bantuan pada kelompok tani dan budi daya ikan air tawar, sementara itu, terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan melaksanakan pembangunan skala kecil, menetapkan prioritas pembangunan pada penanganan masalah faktor sosial masyarakat yang akan mempengaruhi keberhasilan kinerja kecamatan Muara Badak. Adapun usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Badak dilihat pada tabel TC.32 berikut

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perangkat daerah tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedudukan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai kartanegara.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran :

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel :Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2026	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	65	70	75	80	90
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	90	92	28	30	35	40
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persen	63	65	71	74	78	80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penetapan program dan kegiatan atau sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kantor Camat Muara Badak dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2021-2026 bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 yang akan datang yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah.

Penyusunan Rancangan Awala Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”** hal ini sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada Tata kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur wilayah, Lingkungan Hidup, Emonomi Unggulan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Tema Pembangunan Kutai kartanegara Tahun 2026 yaitu Memperkuat Landasan bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah.

Adapun yang menjadi penekanan dalam perumusan rencana program dan kegiatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 yaitu :

1. Penguatan modal sosial dalam mendukung upaya penyediaan kebutuhan dasar dan penurunan kemiskinan daerah.
2. Pengembangan potensi sektor ekonomi terbarukan dalam menopang perekonomian daerah dalam jangka panjang.
3. Penguatan kompetensi birokrasi yang handal dan melayani.

Ketiga pokok permasalahan tersebut diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagai penjabaran dari RPJM Kutai Kartanegara 2021-2026, serta menjadi kebijakan umum dalam penyusunan RKPD merupakan penguatan terhadap *Ranwal Awal Rencana Kerja (Ranwal- Renja) Kec.Muara Badak 2026*

potensi ekonomi terbarukan dalam rangka pembangunan potensi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, hal ini ditetapkan pertanian pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. Serta meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 dan Prakiraan maju Tahun 2026 akan disajikan pada tabel TC-33 di bawah ini.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :

MUARA BADAK

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RKPD Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Badak	74 Nilai	6,496,338,265		74 Nilai	6,891,338,265
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Badak	11 Dokumen	279,790,000		11 Dokumen	624,790,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Muara Badak	3 Dokumen	40,000,000		3 Dokumen	60,000,000
	Penyusunan Dokumen renstra		Muara Badak		20,000,000			
	Penyusunan Dokumen RENJA		Muara Badak		10,000,000			30,000,000
	Penyusunan Dokumen Renja P		Muara Badak		10,000,000			30,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	9,520,000		1 Dokumen	9,520,000

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Badak	1 Dokumen	10,270,000		1 Dokumen	10,270,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3 Laporan	100,000,000		3 Laporan	100,000,000
	Penyusunan Laporan e-Pantau, Laporan Manajemen Risiko dan LKJIP							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	100,000,000
	Evaluasi Renja				100,000,000			100,000,000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Muara Badak	2 Data			2 Data	300,000,000
	Satu Data (Becik)		Muara Badak					250,000,000
	Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)		Muara Badak					50,000,000
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara			1 Berita Acara	25,000,000

	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renja)							25,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4 Dokumen	3,980,878,304		4 Dokumen	4,030,878,304
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Badak	26 Orang/bulan	3,810,653,404		26 Orang/bulan	3,810,653,404
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Badak	1 Laporan	25,184,900		1 Laporan	25,184,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Badak	1 Laporan	145,040,000		1 Laporan	145,040,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		4 Dokumen	65,800,000		4 Dokumen	65,800,000

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen			1 Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Badak	1 Laporan			1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Muara Badak	1 Laporan	40,800,000		1 Laporan	40,800,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Muara Badak	1 Laporan	180,000,000		1 Laporan	180,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Badak	26 Orang	180,000,000		26 Orang	180,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Muara Badak	90 Persen	598,261,349		90 Persen	598,261,349

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	10,000,000		1 Paket	10,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	35,000,000		1 Paket	35,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	150,707,349		1 Paket	150,707,349
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Badak	1 Paket	50,000,000		1 Paket	50,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Badak	1 Laporan	40,000,000		1 Laporan	40,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Badak	1 Laporan	262,554,000		1 Laporan	262,554,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 unit	80,000,000		12 unit	80,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	80,000,000		7 Unit	80,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Badak	90 Persen	728,430,352		90 Persen	728,430,352
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	50,300,000		1 Laporan	50,300,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	395,707,209		12 Laporan	395,707,209
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	12,568,400		1 Laporan	12,568,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	269,854,743		12 Laporan	269,854,743

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		30 Laporan	583,178,260		30 Laporan	583,178,260
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	452,986,900		11 Unit	452,986,900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Badak	20 Unit	40,000,000		20 Unit	40,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Badak	1 Unit	90,191,360		1 Unit	90,191,360
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Muara Badak	100 persen	4,720,533,353		100 persen	5,520,533,353
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Badak	3 kegiatan	200,000,000		3 kegiatan	250,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Badak	1 Dokumen	200,000,000		1 Dokumen	250,000,000

	HUT RI DI KECAMATAN		Muara Badak		200,000,000			250,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Badak	80	30,000,000		80	80,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Badak	2 Laporan	30,000,000		2 Laporan	80,000,000
	OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU		Muara Badak					50,000,000
	PRAMUKA		Muara Badak		30,000,000			30,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		202 Kegiatan	4,490,533,353		202 Kegiatan	5,190,533,353
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4 Laporan	50,000,000		4 Laporan	750,000,000

	PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN		Muara Badak					500,000,000
	FASILITASI PATEN		Muara Badak		50,000,000			50,000,000
	PENANGANAN DARURAT BENCANA							
	PEMELIHARAAN LPJU KECAMATAN							200,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Badak	198 Laporan	4,440,533,353		198 Laporan	4,440,533,353
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif	Muara Badak	78 Persen	955,645,900		78 Persen	970,645,900

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		-	305,645,900		-	320,645,900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		65 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000		65 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000
	Bupati Caup		Muara Badak					
	Musrenbang				75,000,000			90,000,000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1 Dokumen	72,600,000		1 Dokumen	72,600,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	158,045,900		2 Laporan	158,045,900
	FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA				108,045,900			108,045,900
	BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)				50,000,000			50,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1 Laporan	650,000,000		1 Laporan	650,000,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000		5 Lembaga Kemasyarakatan	650,000,000

	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK				155,000,000			155,000,000
	Operasional PKK				200,000,000			200,000,000
	FORUM ANAK				50,000,000			50,000,000
	Honor LINMAS				195,000,000			195,000,000
	Jambore PAUD				50,000,000			50,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		81 Persen	50,000,000		81 Persen	150,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		76 Persen	50,000,000		76 Persen	150,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	50,000,000		1 Laporan	50,000,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	-		2 Laporan	100,000,000
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat							
	SAFARI RAMADHAN							100,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		74 persen	295,650,542		74 persen	400,000,000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		2 Kegiatan	295,650,542		2 Kegiatan	400,000,000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		125 Orang	245,650,542		125 Orang	350,000,000
	Fasilitasi Kegiatan MTQ				245,650,542			350,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				150,000,000			300,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		68 persen	150,000,000		68 persen	300,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							150,000,000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	100,000,000		1 laporan	100,000,000
	JUMLAH				12,668,168,060			14,232,517,518

BAB V

PENUTUP

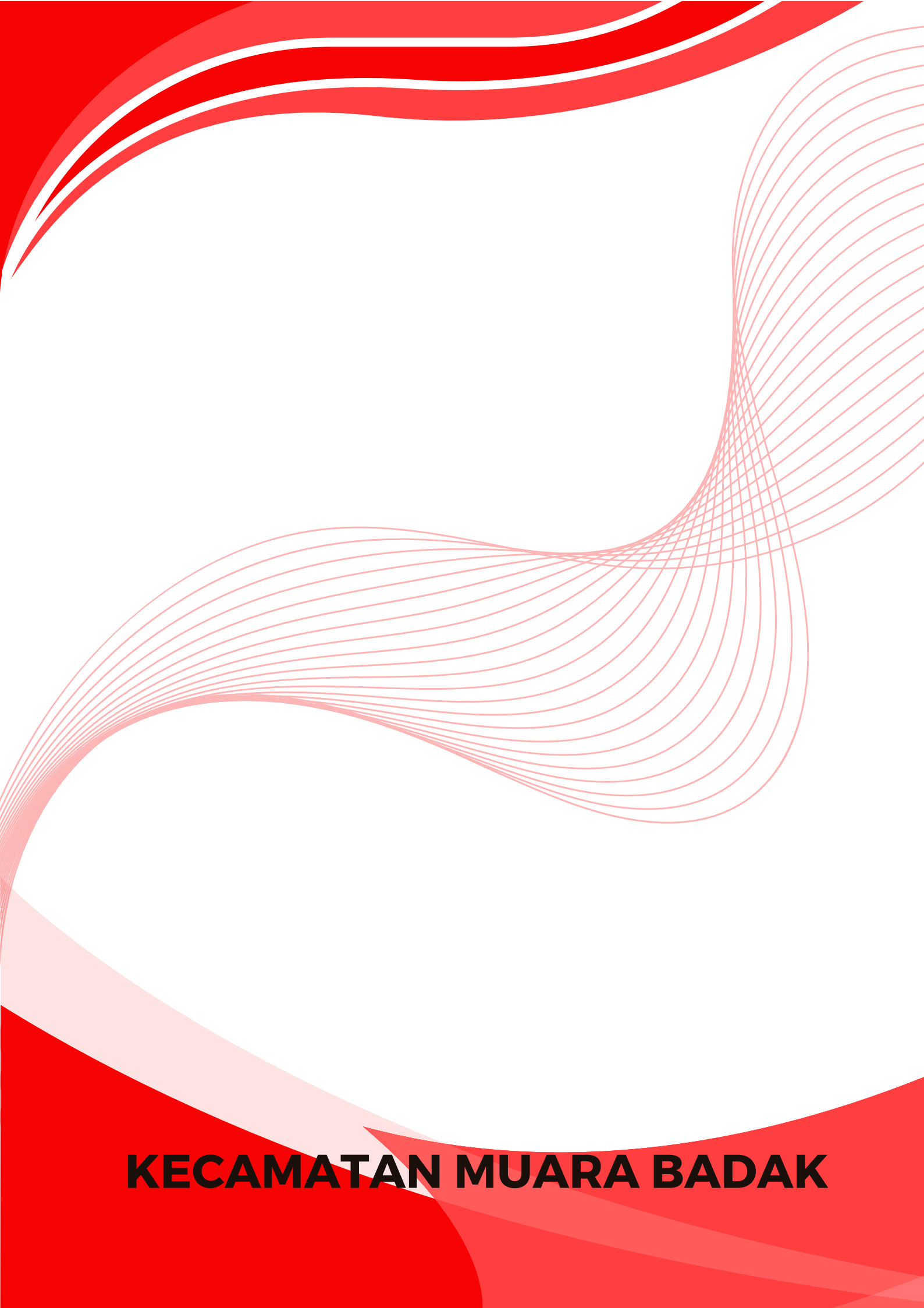
Rencana Kerja Awal (Renwal) Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rancangan Awal Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 20246 Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Muara Badak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Muara Badak, Maret 2025
CAMAT MUARA BADAK

ARPAN, S. Sos
Pembina Tk. I /IV/b
Nip.19680612 198803 1 007



KECAMATAN MUARA BADAK